



Kontribusi Bappeda Menuju Indonesia Emas 2045 Melalui Perannya Membangun Kota Semarang

Adinda Putri Afiliani¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 01 Juni 2024

Revised: 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

Golden Indonesia 2045 is a vision with the theme "Sovereign, Advanced and Sustainable Archipelago" from the long-term Bappenas/Ministry of National Development Planning (RPJPN) program, which aims to realize the stability and progress of the nation so that a prosperous society can be achieved. The synergy of collaboration between government, society and academics is an important component for the sustainability of this by looking at the opportunities for a demographic bonus in the coming years. National development has begun to be carried out in various corners of the archipelago. Starting from the top peak on a national scale to the roots on a smaller scale. In this research, the author looks from the perspective of regional development carried out by Bappeda, which results in discussions in the form of (1) describing the role of Bappeda in sustainable development at the regional level; (2) knowing about participatory development for the community; and (3) analyzing the impact of development on the natural sector.

Keywords: *Musrenbang, Semarang City Bappeda.*

(*) Corresponding Author: dindaafiliani@students.unnes.ac.id

How to Cite: Afiliani, A. P. (2024). Kontribusi Bappeda Menuju Indonesia Emas 2045 Melalui Perannya Membangun Kota Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12702729>.

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki landasan hukum tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, untuk mendorong pembangunan yang lebih sinkron, terintegrasi, dan sinergis baik antar ruang dan waktu, antar daerah, maupun antar pemerintahan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi tonggak penting untuk perkembangan pembangunan regional/daerah dalam menjalankan tupoksinya sebagai tangan kanan Gubernur/Walikota. Yang kemudian Bappeda menjalankan serangkaian program kerja yang terbentuk dari janji politik pemerintah, dimana hal tersebut juga harus selaras dengan piramida hirarki yang telah diregulasikan sebelumnya.

Perencanaan dilakukan oleh Bappeda yang kemudian akan menghasilkan *output* berupa kebijakan dengan diurutkan sesuai skala prioritasnya, menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) setiap 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap satu tahun. Berbagai rencana tersebut berisikan segala visi dan misi, sasaran pokok, strategi, arah kebijakan maupun program, dan lain-lain. Adapun aspek perencanaan meliputi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seperti pendidikan, pariwisata, sosial, kesehatan, pertanian dan sebagainya yang turut melibatkan para pemangku kepentingan.



Cara yang ditempuh Bappeda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan sistem *bottom up*, yaitu mengadakan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang diadakan setiap tahun. Setiap perwakilan/pemangku kepentingan (*stakeholder*) akan diundang untuk menghadiri Musrenbang termasuk dari kalangan Perguruan Tinggi (akademisi). Dari Musrenbang, Bappeda menyerap aspirasi masyarakat dan bisa menentukan prioritas yang akan diambil dari hasil Musrenbang tersebut. Musrenbang Bappeda Kota Semarang juga disiarkan secara *live-stream* melalui *youtube*. Musrenbang dihadiri oleh perwakilan dari kelurahan (musrenbangkel), kecamatan (musrenbangcam), dan perangkat daerah. Selain pihak Bappeda dan DPRD, turut menghadirkan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang mengemban tugas mengelola APBD (yang mana anggaran tersebut berasal dari pusat), dan pihak-pihak lain. Musrenbang berisikan sosialisasi guna mencapai mufakat atas SPPN, yang nantinya menghasilkan RPJP, RPJM, dan RKP baik nasional maupun daerah. Dibersamai dengan partisipasi masyarakat (dalam Musrenbang yang bersifat terbuka dan transparan ini) untuk dapat berkontribusi menyalurkan aspirasi mereka, pemikiran, dan penyelenggaraannya dalam pembangunan daerah. Sehingga dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran Bappeda dalam membangun Kota Semarang?
2. Apa cara yang ditempuh Bappeda untuk meningkatkan pembangunan yang bersifat transparan dan terbuka?
3. Bagaimana Bappeda mencanakan perencanaan pembangunan menimbang dari dampak faktor alam yang mungkin terjadi?

METODE

Metode yang digunakan penulis guna memperoleh data penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu data didapatkan dengan cara observasi/langsung terjun ke instansi terkait (Maya Sita, FT UI, 2010). Penulis mewawancarai langsung kepada pihak Bappeda Kota Semarang sebagai informan, untuk mengetahui langsung kejadian yang sebenarnya dilakukan sehingga menghasilkan data primer. Data sekunder digunakan sebagai pendukung penelitian ini yang berasal dari berbagai macam literatur seperti artikel, jurnal, hingga laman resmi pemerintahan, dan Undang-Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan rangka pembangunan, Bappeda turut memperkenalkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam rencana pembangunan. Ibu Aning Siti Soelastri, SE,MM., selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mengatakan Bappeda Kota Semarang sendiri memiliki sarana atau wadah penampung partisipasi elektronik, baik itu saran/masukan dan kritik yang diberi nama “Sapa Mbak Ita” dengan dasar hukum PP Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2023 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik. Sarana penghubung aspirasi ini

dapat ditemukan langsung dengan cara memasukkan *keyword* pada *search bar* di berbagai *searching engine* yang nantinya terdapat pada laman resmi *sapambakita.lapor.go.id* atau yang terdapat pada berbagai *platform* media sosial Sapa Mba Ita langsung di *twitter*, *instagram*, dan *facebook*.

Yang kedua, tolok ukur pembangunan di Kota Semarang dilihat dari kacamata geografisnya. Indikator penataan ruang meliputi estimasi kelayakan hunian berdasarkan perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk (*capacity and capability*). Kita ambil sampel Kota Jakarta, ketika Jakarta sebagai kota yang mengalami rawan banjir, sekaligus menjadi kota dengan kemacetan terparah, bisa kita analisis hal apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan, sebab akibat, dsb. Kemudian langkah Kota Semarang menimbang atas kejadian yang telah dialami daerah lain, upaya preventif kedepan adalah mempersempit akses guna meminimalisir transmigrasi ke Kota Semarang menurut yang dituturkan oleh Bapak Ir. Purnomo Dwi Sasongko, MM,MT., selaku Sekretaris Bappeda Kota Semarang. Kebanjiran sempat dialami di daerah Universitas Negeri Semarang pada akhir 2022, yaitu di sepanjang jalan umum depan ATM *Centre* BNI UNNES. Analisis yang didapat dari peristiwa bencana alam tersebut dikarenakan sungai tidak mampu menampung luapan air akibat curah hujan yang tinggi dan dampak jangka panjang dilarangnya pembangunan Asrama Putri UNNES di Kalisegoro yang mengakibatkan beban tanah turut terpengaruhi.

Perlu ditekankan lagi bahwasanya Bappeda sebagai *leading sector* dalam setiap perencanaan pembangunan, sehingga bekerja sama dengan berbagai dinas atau instansi lain semisal OPD (Organisasi Perangkat Daerah), DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Kota Semarang, dll. Adapun proyek yang telah dilakukan Bappeda adalah pembangunan Jembatan Banjir Kanal Barat dan sekitarnya, renovasi Kota Lama Semarang, dan lain-lain. Sementara itu untuk proyek kedepannya ada *Techno Park* yang merupakan PSN (Projek Strategis Nasional) yang diamanatkan Bappeda Kota Semarang. Dalam menjalankan programnya, Bappeda mengikuti aturan dari piramida hirarki struktural yang lebih tinggi, atau dari pusat. Namun, jalan berbeda ditempuh apabila terjadi keadaan yang memaksa dan diluar kendali. Contohnya adalah kejadian yang terjadi pada akhir 2023, banjir yang dialami Kota Semarang pasca tahun baru itu yang membuat Bappeda harus mengalokasikan dana untuk difokuskan kepada penanganan banjir. Berbagai perbantuan logistik, tenda pengungsian, dan sebagainya diberikan. Sehingga, anggaran yang awalnya telah diperuntukkan untuk program Balkondes, harus ditunda.

Visi Wali Kota Semarang sekarang adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang SEMAKIN HEBAT berlandaskan PANCASILA dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”. Untuk mencapai visi tersebut dijalankanlah salah satu misi yaitu “Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila”. Pemerintah Kota Semarang setiap tahunnya menyelenggarakan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang mana di tahun ini sendiri telah dimulai pada Maret 2023 lalu, guna membangkitkan inovasi dan memupuk kerjasama berbagai pihak. Dengan beberapa dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pergub Jateng No. 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Perda Provinsi Jawa Tengah No 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jateng tahun 2020 Nomor 37), Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh visi negara maju oleh pemerintah yang telah menetapkan fokus pembangunan tahun 2023. Presiden Joko Widodo menuturkan dengan cara keluar dari zona nyaman yaitu berinovasi mengembangkan potensi sumber daya yang ada sehingga melahirkan cara baru, nilai-nilai baru.

Untuk memisahkan tupoksi Bappeda yang begitu luas, dibentuklah BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diformasikan pada 2019 oleh Presiden Joko Widodo dibawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian pada 2021 BRIN menjadi independen atau terlepas dari Kemenristek yang terintegrasi atas semua badan penelitian nasional Indonesia seperti LIPI, BPPT, BATAN dan LAPAN. Badan penelitian ini juga berdiri yang disebut dengan BRIDA. Sebagai langkah percepatan Indonesia Emas 2045 lebih optimal. Pada regulasi yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2021, BRIN bertugas di bidang litbang, pengkajian, dan masih banyak lagi. Musyawarah antara Bappeda Jawa Tengah dan BRIN pernah dilakukan pada 2022 lalu yang membahas kerja sama seperti penciptaan inovasi, fasilitasi UMKM, pengembangan kawasan berbasis saintek, dll.

KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah melakukan pemusatan inovasi yang dimandatkan kepada BRIN yang terintegrasi dari LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN, sehingga bukan termasuk tupoksi dari Bappeda lagi. Hal ini dilatarbelakangi oleh harapan percepatan Pembangunan lebih terkonsentrasi sehingga dapat optimal.

Perencanaan dan Pembangunan merupakan tupoksi Bappeda sebagai *leading sector* maka dari itu diperlukan kerja sama dengan para pihak lain yang bersangkutan sesuai dengan sektor apa yang termasuk dalam proyeknya. Penelitian ini yang berfokus pada Kota Semarang, dapat dirasakan kebermanfaatannya atas pertumbuhan dan perkembangan atas kerja keras Pemerintah Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, dan instansi lain seperti renovasi kota lama, tata kelola dan ruang Kota Semarang, dll.

Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atas penyampaian penulisan penelitian ini dari awal hingga akhir. Penulis tidak ada maksud sama sekali untuk menyampaikan suatu hal yang bersifat provokatif maupun menimbulkan stigma negatif pada suatu pihak.

Terimakasih atas bantuan dari pihak Bappeda Kota Semarang, terutama rasa terimakasih saya haturkan kepada Bapak Ir. Purnomo Dwi Sasongko, MM,MT., dan Ibu Aning Siti Soelastri, SE,MM., atas bantuannya menjawab berbagai pertanyaan dari wawancara penulis, sehingga penelitian ini dapat selesai dan harapan penulis, penelitian ini dapat membuka dan menambah wawasan kepada para pembaca.

SARAN

BRIN telah berdiri sebagai badan riset inovasi dan BRIDA turut membersamai sebagai representatif dari BRIN untuk terjun ke daerah. Indonesia memiliki banyak sekali badan/instansi pemerintahan sehingga diperlukan penyederhanaan untuk menghindari tumpang tindih para pemangku kekuasaan, dengan cara mempertegas tupoksi masing-masing. Seperti beberapa daerah yang memiliki Bappeda dapat berganti menjadi Bappelitbangda atas perubahan SOTK dan regulasi lain dari masing-masing pemerintah daerah otonomnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional
Badan Riset dan Inovasi Nasional. (n.d.). PIRN. Retrieved from Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): <https://pirn.brin.go.id/lembaga-ilmu-pengetahuan-indonesia/>
- BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH. (2022, 06 29). Retrieved from BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH: <https://bappeda.jatengprov.go.id/bappeda-jateng-dan-badan-riiset-dan-inovasi-nasional-brin-diskusikan-peluang-kerjasama/>
- Indonesia Emas 2045. (2023). Indonesia Emas 2045. Retrieved from <https://indonesia2045.go.id/>
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan IPDN*, 99, 106, dan 112.
- SAPA MBAK ITA. (2022). SAPA MBAK ITA. Retrieved from SAPA MBAK ITA: <https://sapambakita.semarangkota.go.id/>